



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DAN KODE REKENING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN KODE REKENING.**

Pasal I

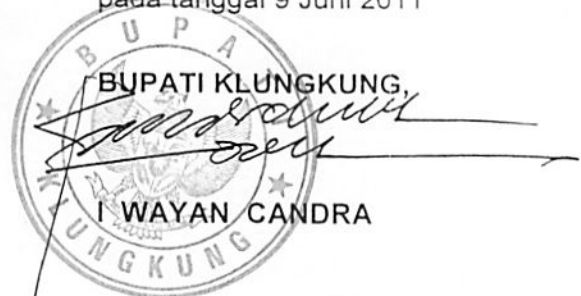
Beberapa Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening diubah sehingga keseluruhan Lampiran III Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juni 2011



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening

Kode Rekening Struktur APBD Klasifikasi Belanja Daerah

Kode Rekening					Uraian
5					BELANJA DAERAH
5	1				Belanja Tidak Langsung
5	1	1			Belanja Pegawai
5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Panitia Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Panitia Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Tunjangan Pengaman Persandian
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5	1	1	03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	04	01	Biaya pemungutan PBB
5	1	1	04	02	Biaya pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05		Belanja Penunjang Operasional
5	1	1	05	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	06		Tambahan berdasarkan pertimbangan Obyek Lainnya
5	1	1	06	01	Tambahan Penghasilan pemberian uang makan
5	1	1	06	02	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
5	1	1	06	03	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
5	1	1	07		Biaya Jasa Pelayanan Medik
5	1	1	07	01	Biaya jasa pelayanan medis
5	1	1	08		Biaya pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	08	01	Biaya pemungutan Retribusi Daerah

Kode Rekening					Uraian
5	1	7	02		Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5	1	7	04		Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5	1	7	04	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	7	04	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5	1	7	05		Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan Partai Politik
5	1	8			Belanja Tidak Terduga
5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga
5	2				Belanja Langsung
5	2	1			Belanja Pegawai
5	2	1	01		Honorarium PNS
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	01	03	Honorarium petugas Pos Jaga
5	2	1	01	04	Honorarium Pelaksana Kegiatan
5	2	1	02		Honorarium Non PNS
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap
5	2	1	03		Uang Lembur
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS
5	2	1	04		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	2	1	04	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	2	1	04	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	2	1	04	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	2	1	04	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	2	1	05		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5	2	1	05	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5	2	1	05	02	Belanja sosialisasi
5	2	1	05	03	Belanja bimbingan teknis
5	2	1	06		Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5	2	1	06	01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5	2	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	2	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	2	2	01	09	Belanja Sesajen


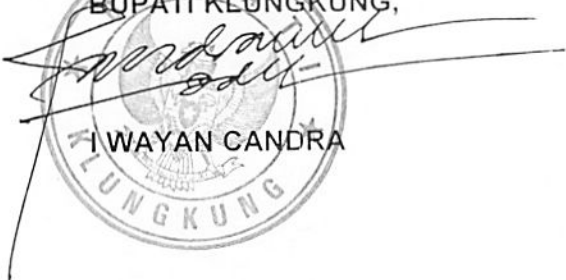
Kode Rekening					Uraian
5	2	2	09		Belanja Sewa Alat Berat
5	2	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	2	2	09	02	Belanja sewa Buldoser
5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	2	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	2	2	10	04	Belanja sewa generator
5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	2	2	10	07	Belanja sewa sound system
5	2	2	10	08	Belanja sewa drum band
5	2	2	10	09	Belanja sewa alat-alat musik tradisional/modern
5	2	2	10	10	Belanja sewa lampu penerangan
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	2	2	11	04	Belanja makanan dan Minuman pelatihan/bintek
5	2	2	11	05	Belanja makanan ternak
5	2	2	11	06	Belanja makanan dan minuman rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati
5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	2	2	12	01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)
5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5	2	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5	2	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	2	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	2	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	2	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	2	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	2	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	2	2	17	03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5	2	2	18		Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5	2	2	18	01	Belanja Pemeliharaan gedung/kantor
5	2	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Air kotor
5	2	2	18	03	Belanja Pemeliharaan rambu/marka jalan
5	2	2	18	04	Belanja Pemeliharaan rumah jabatan/dinas

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	01	21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5	2	3	01	22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
5	2	3	01	23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5	2	3	01	24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5	2	3	01	25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5	2	3	01	26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5	2	3	01	27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
5	2	3	01	28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
5	2	3	01	29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5	2	3	01	30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5	2	3	01	31	Belanja modal pengadaan tanah hutan
5	2	3	01	32	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum irigasi/air limbah/air kotor/air bersih/air minum
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat					
5	2	3	02	01	Belanja modal pengadaan traktor
5	2	3	02	02	Belanja modal pengadaan buldozer
5	2	3	02	03	Belanja modal pengadaan stoom wals
5	2	3	02	04	Belanja modal pengadaan eskavator
5	2	3	02	05	Belanja modal pengadaan dump truk
5	2	3	02	06	Belanja modal pengadaan crane
5	2	3	02	07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5	2	3	02	08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5	2	3	02	09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5	2	3	02	10	Belanja modal pengadaan mesin pompa air
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor					
5	2	3	03	01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5	2	3	03	02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5	2	3	03	04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5	2	3	03	05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5	2	3	03	06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5	2	3	03	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5	2	3	03	08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5	2	3	03	10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5	2	3	03	11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5	2	3	03	13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5	2	3	03	14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor					
5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak
5	2	3	04	02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5	2	3	04	03	Belanja modal pengadaan becak
5	2	3	04	04	Belanja modal pengadaan sepeda
5	2	3	04	05	Belanja modal pengadaan karavan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor					
5	2	3	05	01	Belanja modal pengadaan kapal motor
5	2	3	05	02	Belanja modal pengadaan kapal feri
5	2	3	05	03	Belanja modal pengadaan speed boat
5	2	3	05	04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
5	2	3	05	05	Belanja modal pengadaan hydro foil
5	2	3	05	06	Belanja modal pengadaan jet foil
5	2	3	05	07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
5	2	3	05	08	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5	2	3	05	09	Belanja modal pengadaan kapal kargo
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor					
5	2	3	06	01	Belanja modal pengadaan perahu layar
5	2	3	06	02	Belanja modal pengadaan perahu sampan

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book
5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer
5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner
5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display
5	2	3	12	07	Belanja modal pengadaan CPU
5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5	2	3	12	11	Belanja modal pengadaan software/Program komputer
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair					
5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja
5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat
5	2	3	13	03	Belanja modal pengadaan meja makan
5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja
5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat
5	2	3	13	06	Belanja modal pengadaan kursi makan
5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur
5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa
5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
5	2	3	13	10	Belanja modal pengadaan perlengkapan meja/kursi/tempat tidur/sofa
5	2	3	13	11	Belanja modal pengadaan meja sekolah, kursi sekolah, bangku sekolah
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur					
5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas
5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas
5	2	3	14	03	Belanja modal pengadaan lemari makan
5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser
5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas
5	2	3	14	06	Belanja modal pengadaan rak piring
5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5	2	3	14	08	Belanja modal perlengkapan dispenser/kulkas dapur rumah jabatan
5	2	3	14	09	Belanja modal pengadaan termos
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga					
5	2	3	15	01	Belanja modal pengadaan lampu hias
5	2	3	15	02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan rangkaian pohon imitasi/bunga imitasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio					
5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera
5	2	3	16	02	Belanja modal pengadaan handycam
5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi					
5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon
5	2	3	17	02	Belanja modal pengadaan faximili
5	2	3	17	03	Belanja modal pengadaan radio SSB
5	2	3	17	04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5	2	3	17	05	Belanja modal pengadaan radio VHF
5	2	3	17	06	Belanja modal pengadaan radio UHF
5	2	3	17	07	Belanja modal pengadaan alat sandi
5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan sound system
5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan megaphone
5	2	3	17	10	Belanja modal pengadaan paging system
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur					
5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan timbangan
5	2	3	18	02	Belanja modal pengadaan teodolite
5	2	3	18	03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
5	2	3	18	04	Belanja modal pengadaan alat GPS

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	24	02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman
5	2	3	24	03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota
5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi media elektronik berlangganan
5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5	2	3	26	02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5	2	3	26	04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5	2	3	26	05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5	2	3	26	06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5	2	3	26	07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan
5	2	3	26	08	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	26	09	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat olahraga
5	2	3	26	10	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah
5	2	3	26	11	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat ibadah
5	2	3	26	12	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung bungalow/penginapan/villa/hotel
5	2	3	26	13	Belanja Modal Pengadaan kontruksi/pembelian taman
5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5	2	3	27	01	Belanja modal pengadaan buku matematika
5	2	3	27	02	Belanja modal pengadaan buku fisika
5	2	3	27	03	Belanja modal pengadaan buku kimia
5	2	3	27	04	Belanja modal pengadaan buku biologi
5	2	3	27	05	Belanja modal pengadaan buku biografi
5	2	3	27	06	Belanja modal pengadaan buku geografi
5	2	3	27	07	Belanja modal pengadaan buku astronomi
5	2	3	27	08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
5	2	3	27	10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
5	2	3	27	11	Belanja modal pengadaan buku sejarah
5	2	3	27	12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
5	2	3	27	13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5	2	3	27	14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5	2	3	27	15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5	2	3	27	16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5	2	3	27	17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
5	2	3	27	18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
5	2	3	27	19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5	2	3	27	20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
5	2	3	27	21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5	2	3	27	22	Belanja modal pengadaan buku naskah
5	2	3	27	23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5	2	3	27	24	Belanja modal pengadaan mikrofilm
5	2	3	27	25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe
5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5	2	3	28	01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto
5	2	3	28	02	Belanja modal pengadaan patung
5	2	3	28	03	Belanja modal pengadaan ukiran
5	2	3	28	04	Belanja modal pengadaan pahatan
5	2	3	28	05	Belanja modal pengadaan batu alam
5	2	3	28	06	Belanja modal pengadaan maket/miniatur/diorama
5	2	3	28	07	Belanja modal pengadaan alat-alat musik tradisional/modern
5	2	3	29		Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5	2	3	29	01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
5	2	3	29	02	Belanja modal pengadaan ternak

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	29	03	Belanja modal pengadaan tanaman
5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5	2	3	30	01	Belanja modal pengadaan senjata api
5	2	3	30	02	Belanja modal pengadaan radar
5	2	3	30	03	Belanja modal pengadaan mobil water canon
5	2	3	30	04	Belanja modal pengadaan borgol
5	2	3	30	05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet
5	2	3	30	06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
5	2	3	30	07	Belanja modal pengadaan detektor logam
5	2	3	30	08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
5	2	3	30	09	Belanja modal pengadaan pentungan
5	2	3	30	10	Belanja modal pengadaan helm
5	2	3	30	11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene
5	2	3	30	12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
5	2	3	31		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga
5	2	3	31	01	Belanja modal pengadaan trade mill
5	2	3	31	02	Belanja modal pengadaan kursi pijat
5	2	3	31	03	Belanja modal pengadaan alat terapi kaki
5	2	3	32		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan rumah tangga
5	2	3	32	01	Belanja modal pengadaan setrika
5	2	3	32	02	Belanja modal pengadaan tempat jemuran
5	2	3	32	03	Belanja modal pengadaan mesin cuci
5	2	3	33		Belanja Modal Dana BOS
5	2	3	33	01	Belanja Modal Dana BOS


 BUPATI KLUNGKUNG,

 I WAYAN CANDRA